



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LkjIP) 2019**

**DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Jl. KH. Samanudi**

**Komplek Perkantoran Cangakan. Karanganyar 57712**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha kecil dan Menengah dapat mewujudkan tata pimpinan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan dan perubahan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Demikian LkjIP Tahun 2019 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah yang dapat memberi informasi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

KARANGANYAR,                      JANUARI 2020

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



**MARTADI, S.Sos., M.M**

Pembina TK. I

NIP. 19650323 198908 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Perencanaan Kinerja .....	5
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	12
A. Capaian Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	24
C. Pendapatan Asli Daerah .....	26
Bab IV Penutup .....	28
A. Simpulan Umum Capaian Kinerja .....	28
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang .....	28
Lampiran	
1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah tahun 2019-2023	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Cascading Indikator Kinerja Utama	
4. Rencana Aksi 2019	
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
6. Perjanjian Kinerja	
7. Rencana Kerja Tahun 2021	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar seperti terlampir

## **B. FUNGSI STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : berperan meningkatkan ekonomi masyarakat yang kokoh disamping sebagai perumus kebijakan di lingkup Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui misi:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui penilaian kapasitas SDM koperasi, baik melalui pelatihan maupun bimbingan teknis dan manajemen koperasi.
2. Peningkatan kualitas pemantauan melalui penilaian pada seluruh koperasi yang ada di Karanganyar untuk menentukan penghapusan atau perbaikan manajemen pada koperasi itu sendiri.
3. Peningkatan kemampuan permodalan koperasi melalui berbagai kegiatan fasilitasi dan sasehan dengan manajemen koperasi bersama investor-investor potensial.

4. Mendorong peningkatan status usaha mikro kecil melalui pembinaan terhadap kelompok UKM dan melakukan skala prioritas pada UKM – UKM yang sudah berada pada kelompok klaster.
5. Peningkatan kemampuan usaha UKM melalui fasilitas peralatan, permodalan dan peningkatan ketrampilan pelaku UKM.
6. Peningkatan sarana prasarana perdagangan melalui pembangunan sarana baru, rehabilitasi dan pemeliharaan berbagi sarana perdagangan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan ketrampilan kerja pada masyarakat dengan status pengangguran dan pengembangan kapasitas pada angkatan kerja yang belum terampil tetapi sudah bekerja.
8. Peningkatan kapasitas ataupun daya tampung BLK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
9. Meningkatkan sarana prasarana
10. Meningkatkan kemampuan Aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi difokuskan pada koperasi sehat dan aktif.
2. Penyederhanaan jumlah koperasi berdasarkan hasil penilaian dengan fokus pada penghapusan koperasi yang sudah tidak aktif selama 5 tahun.
3. Peningkatan sistem monitoring perkembangan koperasi dengan menerapkan NIK pada setiap koperasi.
4. Menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dalam meningkatkan kemampuan permodalan koperasi.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
7. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha.
8. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana pasar tradisional dan alat ukur timbangan.

10. Perluasan penataan PKL pada wilayah – wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan pariwisata dan perdagangan.
11. Pendidikan dan pelatihan pencari fokus kerjasama dengan LPK-LPK yang menjadi binaan pemerintah daerah.
12. Melakukan sertifikasi tenaga kerja sesuai keahliannya yang dibutuhkan oleh usaha dunia.
13. Melakukan kemitraan dengan perusahaan di daerah yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
14. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan terutama dalam menjamin perlindungan tenaga kerja daerah.
15. Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitas Sekretariat yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja dinas yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
16. Penyediaan sarana dan fasilitas.
17. Mengadakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang



menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.926.476.700,00</b>	<b>1.845.542.779,00</b>	<b>98,56</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000.0000,00	3500.0000 ,00	87,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	324.440.000,00	316.380.504,00	97,52
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor	252.973.300	217.669.422,00	86,04
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	658.500.000	625.930.000,00	95,05
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.000.000,00	77.935.000,00	99,92
6	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	42.763.400	42.763.400,00	100

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.321.620,00	91,61
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	95.000.000,00	93.880.000,00	98,82
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	282.800.000,00	282.636.833,00	99,94
10	Penyediaan Cetak Karcis	138.000.000,00	136.526.000,00	98,93
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur</b>	<b>379.065.300,00</b>	<b>376.604.000,00</b>	<b>99,35</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.335.000,00	60.235.000,00	99,83
2	Pengadaan Komputer	96.500.000,00	95.500.000,00	98,96
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	202.230.300,00	200.969.000,00	99,38
4	Pemeliharaan computer	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>105.636.500,00</b>	<b>89,83</b>
1	Penyusunan laporan barang inventarisasi	10.000.000,00	9.880.000,00	98,80
2	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	10.000.000,00	20.500.000,00	82,00
3	Fasilitasi Penyusunan LPT SKPD	7.600.000,00	6.229.500,00	81,97
4	Penyusunan LKJIP	5.000.000,00	5000.000,00	100
5	Penyusunan Renstra OPD	60.000.000,00	59.463.000,00	99,11
6	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP/SPIP)	10.000.000,00	4.564.000,00	45,64
<b>IV</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>298.281.500,00</b>	<b>96,22</b>
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	Expo Produk UKM dan Koperasi	90.000.000,00	89.575.000,00	
3	Bimbingan Kewirausahaan Menuju Usaha Mandiri	40.000.000,00	38.800.000,00	
4	Peningkatan SDM Bagi UMKM	40.000.000,00	37.956.500,00	
5	Pengiriman Pameran Koperasi	25.000.000,00	17.200.000,00	
6	Gebyar UKM Kabupaten Karanganyar	100.000.000,00	99.750.000,00	

<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>515.129.498,00</b>	<b>98,12</b>
1	Pengawasan Koperasi Serta Penyusunan NIK dan Orientasi	65.000.000,00	61.035.000,00	93,90
2	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Aktif	50.000.000,00	48.899.998,00	97,80
3	Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi	10.000.000,00	9600.000,00	96,00
4	Diklat Koperasi Berbasis Kompetensi Bagi Pengurus/ Pengeloa Koperasi	150.000.000,00	149.820.500,00	99,88
5	Pelatihan Good Cooperative Governance Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi	150.000.000,00	146.592.000,00	97,73
	Peningkatan Kualitas SDM dan Orientasi Bagi Pengurus dan Pengeloa Koperasi	100.000.000,00	99.182.000,00	99,18
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>2.196.000.000,00</b>	<b>2.153.376.950,00</b>	<b>98,06</b>
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan	1.996.000.000	1.953.759.950,00	97,88
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Persampahan	200.000.000	199.617.000,00	99,81
	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>1.459.500.000,00</b>	<b>1.137.875.000</b>	<b>77,96</b>
1	Pelatihan Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen	25.000.000	24.525.000,00	98,10
2	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perizinan (SIUP, TDP, dan TDG)	15.000.000	14.950.000,00	99,67
3	Pengadaan Sarana Prasarana Operasional Layanan Kemetrolgian	1.419.500.000	1.098.400.000,00	77,38
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>5.582.870.000,00</b>	<b>4.953.653.250,00</b>	<b>88,73</b>
1	Pemantauan UTTP	20.000.000	20.000.000,00	100
2	Penguatan Ekonomi Masyarakat Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sarana Prasarana Perdagangan	100.000.000	99.494.000,00	99,49
3	Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar	10.000.000	10.000.000,00	100
4	Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis	10.000.000	10.000.000,00	100

5	Pembinaan UKM	25.000.000	18.100.000,00	72,40
6	Pemeliharaan Pasar Tegalgede	100.000.000	99.290.000,00	99,29
7	Pameran Intanpari	150.000.000	149.950.000,00	99,97
8	Fasilitasi Pameran Intanpari Luar Daerah	100.000.000	93.519.400,00	93,52
9	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar	420.000.000	412.300.000,00	98,17
10	Pemeliharaan Pemadam Kebakaran dan Hindrant Air Pasar	15.000.000	15.000.000,00	100
11	Pembangunan Ruko/Sheltel Pasar Nglano	750.000.000	628.374.000,00	83,78
12	Sosialisasi Pembangunan Pasar	25.000.000	25.000.000,00	100
13	Biaya sewa tanah pasar palur	60.000.000	42.318.850,00	70,53
14	Rehabilitasi Pasar Rakyat Karangpandan (DBHCHT)	170.000.000	164.893.000,00	97,00
15	Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar Kebakkramat	1.427.908.000	1.205.942.000,00	84,46
16	Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar Kemuning	1.443.908.000	1.209.755.000,00	83,78
17	Sosialisasi dan Pembinaan UTTP	10.000.000	9.750.000,00	97,50
18	Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pedagang Pasar	10.000.000	10.000.000,00	100
19	Pendataan Perdagangan Pasar dan Perijinan Bagi Pedagang Pasar	10.000.000	9.190.000,00	91,90
20	Bimbingan Teknis Pengelola Kebersihan dan Satpam Pasar	20.000.000	20.000.000,00	100
21	Rehabilitasi Pasar Kwadungan (DBHCHT)	30.000.000	28.286.000,00	94,29
22	Rehabilitasi Lingkungan Pasar Jatiyoso (DBHCHT)	150.000.000	149.676.000,00	99,78
23	Rehabilitasi Lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu (DBHCHT)	200.000.000	199.691.000,00	99,85
24	Rehabilitasi Pasar Tuban (DBHCHT)	0	0	0
25	Rehabilitasi Lingkungan Pasar Tegalgede (DBHCHT)	100.000.000	99.668.000,00	99,67
25	Rehabilitasi Pasar Bolong Karanganyar (DBHCHT)	100.000.000	99.759.000,00	99,76
26	Pemasangan/Perakitan Pasar Darurat Pasar Kemuning (DBHCHT)	51.054.000	50.741.000,00	99,39
28	Pembangunan Mushola dan Pagar TPS Pasar Matesih	75.000.000	72.956.000,00	99,39

	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>385.000.000,00</b>	<b>378.560.000,00</b>	<b>98,33</b>
1	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	160.000.000,00	157.660.000,00	98,54
2	Pemberdayaan Pedagang Kios Pujasera Belakang Bank Jateng	50.000.000,00	50.000.000,00	100
3	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Se Kabupaten Karanganyar	30.000.000,00	29.000.000,00	96,67
4	Sosialisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	75.000.000,00	73.400.000,00	97,87
5	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
6	Pembinaan Pedagang Pasar	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>2.360.000.000,00</b>	<b>2.102.205.400,00</b>	<b>89,08</b>
1	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) (DBHCHT)	1.350.000.000,00	1.108.842.000,00	82,14
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan BLK (DBHCHT)	200.000.000,00	199.422.000,00	99,71
3	Rehabilitasi Gedung Pelatihan BLK (DBHCHT)	0	0	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pelatihan BLK (DBHCHT)	100.000.000,00	98.534.500,00	98,53
5	Pembangunan Gudang, Tempat Genset, dan Tempat Laundry BLK (DBHCHT)	150.000.000,00	148.200.000,00	98,80
6	Pembinaan dan pengembangan LPKS	20.000.000,00	17.878.250,00	89,39
7	Pelatihan Tenaga Kerja dan UKM	37.500.000,00	35.355.000,00	94,28
8	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	50.000.000,00	45.345.650,00	90,69
9	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri	200.000.000,00	199.031.000,00	99,52
10	Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan	37.500.000,00	35.587.000,000	94,90
11	Pengadaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan	200.000.000,00	199.184.000,00	99,59
12	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	15.000.000,00	14.826.000,00	98,84
	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Penyebarluasan informasi tenaga	25.000000,00	24.975.000,00	99,90

	kerja			
2	Penempatan tenaga kerja luar negeri	30.000.000,00	28.397.750,00	94,66
3	Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (TKA)	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00
4	Penyuluhan bimbingan dan jabatan	10.000.000,00	9.299.500,00	99,63
5	Survei Lisensi/ Pengawasan ISO 9001-2015	75.000.000,00	74.730.000,00	99,63
	<b>Program Transmigrasi Regional</b>	<b>137.000.000,00</b>	<b>130.904.564,00</b>	<b>95,55</b>
1	Kegiatan Penyuluhan, Penampungan Dan Pemberangkatan Transmigran	137.000.000,00	130.904.564,00	95,55
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>234.270.000,00</b>	<b>99,69</b>
1	Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	30.000.000	29.820.000,00	99,40
2	Pemberdayaan LK Tripartit	100.000.000	99.625.000,00	99,63
3	Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja	25.000.000	25.000.000,00	100
4	Bimbingan Teknis Tata Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	25.000.000	24.825.000,00	99,30
5	Bimbingan teknis penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial	25.000.000	25.000.000,00	100
6	Deteksi dini kerawanan perusahaan	20.000.000	20.000.000,00	100
7	Penyuluhan Pencegahan Keresahan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	10.000.000	10.000.000,00	100
	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>			
1	Pengelolaan / Pemeliharaan Website	15.000.000	15.000.000	100
2	Failitasi Pengelolaan PPID	5.000.000	5.000.000	100

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 15 program dan 99 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 15.878,512.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.493.841.691,- realisasi fisik sebesar (97,73%).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2019 yaitu :

Sasaran Strategis 1. : Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas.

Tolok ukur capaian sasaran strategis 1, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu : Persentase Koperasi Aktif, Persentasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil. Untuk

mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 maka dilakukan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Sasaran Strategi 1

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi aktif	71,78	72,02%	65,80%	91,36%
2	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	NA	4,19%	4,79%	114,32%
<b>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1.</b>					<b>102,84</b>

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas sebesar **102,84%** atau kategori **Sangat Baik**. Dengan perincian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif tercapai sebesar 91,36%, Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil tercapai sebesar 114,32%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar **Rp.835.000.000,-** atau **5,25%** dari total pagu sebesar **Rp. 15.878.512.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar **Rp.813.410.998,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.21.589.002,-**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 Adalah

1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
  - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - b. Expo Produk UKM dan Koperasi
  - c. Bimbingan Kewirausahaan Menuju Usaha Mandiri
  - d. Peningkatan SDM Bagi UMKM
  - e. Pengiriman Pameran Koperasi



- f. Gebyar UKM Kabupaten Karanganyar
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - a. Pengawasan Koperasi Serta Penyusunan NIK dan Orientasi
  - b. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Aktif
  - c. Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi
  - d. Diklat Koperasi Berbasis Kompetensi Bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi
  - e. Pelatihan Good Cooperative Governance Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi
  - f. Peningkatan Kualitas SDM dan Orientasi Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 Adalah sebagai berikut :





Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan

Tolok ukur capaian sasaran strategis 2, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Persentase retribusi perdagangan dalam PAD. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 maka dilakukan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	NA	1%	1%	100,00%
<b>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2.</b>					<b>100,00%</b>

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan sebesar **100,00%** atau

kategori **Baik**. Dengan perincian Indikator Kinerja Persentase retribusi perdagangan dalam PAD tercapai sebesar 100,00%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar **Rp.9.623.370.000,-** atau **60,60%** dari total pagu sebesar **Rp.15.878.512.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar **Rp.8.623.465.200,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.999.904.800,-**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 Adalah

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - a. Pelatihan Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen
  - b. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perizinan (SIUP, TDP, dan TDG)
  - c. Pengadaan Sarana Prasarana Operasional Layanan Kemetrolgian
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - a. Pemantauan UTTP
  - b. Penguatan Ekonomi Masyarakat Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sarana Prasarana Perdagangan
  - c. Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar
  - d. Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis
  - e. Pembinaan UKM
  - f. Pemeliharaan Pasar Tegalgede
  - g. Pameran Intanpari
  - h. Fasilitas Pameran Intanpari Luar Daerah
  - i. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar
  - j. Pemeliharaan Pemadam Kebakaran dan Hindrant Air Pasar
  - k. Pembangunan Ruko/Sheltel Pasar Nglano
  - l. Sosialisasi Pembangunan Pasar

- m. Biaya sewa tanah pasar palur
  - n. Rehabilitasi Pasar Rakyat Karangpandan (DBHCHT)
  - o. Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar Kebakkramat
  - p. Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar Kemuning
  - q. Sosialisasi dan Pembinaan UTTP
  - r. Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pedagang Pasar
  - s. Pendataan Perdagangan Pasar dan Perijinan Bagi Pedagang Pasar
  - t. Bimbingan Teknis Pengelola Kebersihan dan Satpam Pasar
  - u. Rehabilitasi Pasar Kwadungan (DBHCHT)
  - v. Rehabilitasi Lingkungan Pasar Jatiyoso (DBHCHT)
  - w. Rehabilitasi Lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu (DBHCHT)
  - x. Rehabilitasi Lingkungan Pasar Tegalgede (DBHCHT)
  - y. Rehabilitasi Pasar Bolong Karanganyar (DBHCHT)
  - z. Pemasangan/Perakitan Pasar Darurat Pasar Kemuning (DBHCHT)
  - aa. Pembangunan Mushola dan Pagar TPS Pasar Matesih
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
- a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
  - b. Pemberdayaan Pedagang Kios Pujasera Belakang Bank Jateng
  - c. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Se Kabupaten Karanganyar
  - d. Sosialisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - e. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - f. Pembinaan Pedagang Pasar
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- a. Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 Adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja

Tolok ukur capaian sasaran strategis 3, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 3 maka dilakukan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya pelayanan tenaga	84,71%	85,40%	62,55%	73,24%

	kerja, calon tenaga kerja				
<b>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3.</b>					<b>73,24%</b>

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan sebesar **73,24%** atau kategori **Cukup**. Dengan perincian Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan tercapai sebesar 73,24%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar **Rp.2.877.000.000,-** atau **18,12%** dari total pagu sebesar **Rp.15.878.512.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar **Rp.2.609.482.214,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.267.517.786,-**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 Adalah

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) (DBHCHT)
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan BLK (DBHCHT)
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pelatihan BLK (DBHCHT)
  - d. Pembangunan Gudang, Tempat Genset, dan Tempat Laundry BLK (DBHCHT)
  - e. Pembinaan dan pengembangan LPKS
  - f. Pelatihan Tenaga Kerja dan UKM
  - g. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja
  - h. Pelatihan Peningkatan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri
  - i. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan

- j. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan
  - k. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
    - a. Penyebarluasan informasi tenaga kerja
    - b. Penempatan tenaga kerja luar negeri
    - c. Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (TKA)
    - d. Penyuluhan bimbingan dan jabatan
    - e. Survei Lisensi/ Pengawasan ISO 9001-2015
  3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
    - a. Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
    - b. Pemberdayaan LK Tripartit
    - c. Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja
    - d. Bimbingan Teknis Tata Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    - e. Bimbingan teknis penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial
    - f. Deteksi dini kerawanan perusahaan
    - g. Penyuluhan Pencegahan Keresahan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja
  4. Program transmigrasi regional
    - a. Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatan transmigran

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 Adalah sebagai berikut :





Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja

Tolok ukur capaian sasaran strategis 4, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu : Nilai SAKIP, Nilai IKM. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 4 maka dilakukan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	NA	60,01	60,01	100%
		NA	100	84,21	84,21%
<b>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 4.</b>					<b>92,11%</b>

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan sebesar **92,11%** atau kategori **Baik**. Dengan perincian Indikator Kinerja Nilai SAKIP tercapai sebesar 100%, Nilai IKM tercapai sebesar 84,21%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar **Rp.2.543.142.000,-** atau **16,02%** dari total pagu sebesar **Rp.15.878.512.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar **Rp.2.447.483.279,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.95.658.721,-**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4  
Adalah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - f. Penyediaan alat tulis kantor
  - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - i. Penyediaan makanan dan minuman
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
  - k. Penyediaan Cetak Karcis
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - b. Pengadaan Komputer
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan komputer
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a. Penyusunan laporan barang inventarisasi

- b. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
  - c. Fasilitasi Penyusunan LPT SKPD
  - d. Penyusunan LKJIP
  - e. Penyusunan Renstra OPD
  - f. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP/SPIP)
- e. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- a. Pengelolaan / Pemeliharaan Website
  - b. Fasilitasi Pengelolaan PPID

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.878.512.000 ( Lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Penggunaan anggaran dalam mendukung capaian sasaran strategis dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel. 3. 6

Anggaran Biaya dalam mendukung Sasaran Stategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2019

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengelolaan kelembagaan koperasi yan berkualitas	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp 310.000.000	Rp 298.281.500	96,22%
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rp 525.000.000	Rp 515.129.498	98,12%

	Koperasi			
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.196.000.000	Rp 2.153.376.950	98,06%
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan	Rp 1.459.500.000	Rp 1.137.875.000	77,96%
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp 5.582.870.000	Rp 4.953.653.250	88,73%
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rp 385.000.000	Rp 378.560.000	98,33%
Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.360.000.000	Rp 2.102.205.400	89,08%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 145.000.000	Rp 142.102.250	98,00%
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rp 235.000.000	Rp 234.270.000	99,69%
	Program transmigrasi regional	Rp 137.000.000	Rp 130.904.564	99,55%
Meningkatnya kinerja perencanaan,	Program pelayanan administrasi	Rp 1.926.476.700	Rp 1.845.542.779	95,80%

pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	perkantoran			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 379.065.300	Rp 376.604.000	99,35%
	Program kapasitas sumber daya aparatur	Rp 100.000.000	Rp 99.700.000	99,70%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 117.600.000	Rp 105.636.500	89,83%
	Program pemanfaatan teknologi informasi	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100%

Sumber : Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah

### C. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.7

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

		Anggaran	Realisasi	Persentase
4	Pendapatan	3.376.356.000	3.894.054.156	115,3%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.376.356.000	3.894.054.156	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.376.356.000	3.894.054.156	
4.1.2.02	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	304.696.000	320.740.600	
4.1.2.06	Retribusi pelayanan pasar	2.605.000.000	2.637.192.200	
4.1.2.15	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	218.493.913	368.429.711	
4.1.2.19	Retribusi tempat	248.166.087	264.095.033	

	khusus parkir			
4.1.2.32	Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA)	0		
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	0	235.773.620	
4.1.4.16	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	0	45.000.000	
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang sah lainnya	0	190.773.620	

Sumber pendapatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, antara lain :

a. Retribusi pelayanan pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan sarana prasarana yang dikelola Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

b. Retribusi pelayanan persampahan/ RKK

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan.

c. Retribusi parkir khusus

Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah. Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir.

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi yang dipungut atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah. Dalam hal ini berupa MCK.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada masyarakat.

Pada tahun 2019 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangayar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis dengan baik. Capaian kinerja ini dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran kegiatan yang mencukupi serta pengelolaan nilai-nilai organisasi yang baik.

### **B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa mendatang adalah peningkatan kesempatan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan cara memprioritaskan pembangunan pada :

1. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  - a. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah
  - b. Peningkatan kinerja industri agar dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja

- c. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja
  - d. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan
  - e. Fasilitasi dan pengembangan lembaga kursus/pelatihan tenaga kerja
  - f. Peningkatan peran serikat pekerja dalam fasilitasi perselisihan hubungan industrial
  - g. Peningkatan MOU dengan daerah tujuan transmigrasi lainnya.
  - h. Peningkatan kerja sama dengan daerah tujuan trasnmigrasi dalam hal penyediaan sarana prasarana di lokasi transmigrasi.
2. Bidang Perdagangan dan Pasar :
- a. Meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;
  - b. Mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;
  - c. Mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;
  - d. Mengoptimalkan penyiaran dan informasi pasar kepada masyarakat;
  - e. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor;
  - f. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah;
  - g. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h. Mengoptimalkan pendapat retribusi pasar
  - i. Melakukan revitalisasi dan pemetaan fasilitas perdagangan di pasar daerah
  - j. Menciptakan pasar daerah yang bersih, tertib, nyaman dan aman
  - k. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola pasar daerah
  - l. Melakukan regulasi tarif retribusi pasar



3. Bidang Koperasi dan UKM :

- a. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM;
- b. Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan dan permodalan serta pemasaran;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi;
- d. Meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

KARANGANYAR,                      JANUARI 2020

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
**MARTADI, S.Sos., M.M**  
Pembina TK. I  
NIP. 19650323 198908 1 001